**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT UTAMA
SISTEM SENJATA OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Oleh : Andri Ardiansyah

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing II : Elmayanti, SH.,MH

Alamat : Jl. Suka Karya No.13 Kecamatan Tampan Pekanbaru

Email : andriibnumardiansyah@gmail.com

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission is an independent institution specifically formed to handle corruption cases that are equipped with a set of authority in carrying out the tasks of investigation, investigation and prosecution. In carrying out the duties and authority of the Corruption Eradication Commission in conducting investigations of the perpetrators of corruption, the procurement of the main equipment of the weapons system clashes with the oath of soldiers and the Military Justice Law, which has led to pros and cons in various circles.

The purpose of writing this thesis is; first, to find out the authority of the Corruption Eradication Commission in investigating the perpetrators of corruption in the procurement of the main weapons system, especially those carried out by the Indonesian National Armed Forces. second, to find out the criminal law policy on the authority of the Corruption Eradication Commission in investigating perpetrators of corruption in the procurement of the main weapons system by the Indonesian National Armed Forces.

In writing this thesis the author uses the normative juridical research method that emphasizes legal principles, namely the principle of legality. Then analyzed qualitatively and then make conclusions with the deductive method. The results of the author's research, are; First, the Investigation carried out by the Corruption Eradication Commission has a legal basis Article 42 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. All authorities related to investigations, investigations and prosecutions as stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law also apply to investigators, investigators, and public prosecutors in the Corruption Eradication Commission. Criminal law policy towards the handling carried out by the KPK and the Military related to the corruption case of the procurement of defense equipment is a separate treatment. Finally, the authors submit a suggestion that the President together with the House of Representatives (DPR) need to establish a regulation regarding the procedures and procedures regarding the investigation or existing laws must be amended so that there is no error in the authority of the investigation by any institution including the KPK, and so that the implementation or implementation the investigation has a clear legal umbrella and has legal jurisdiction.

Keywords: Investigation - Corruption Crime - Military

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.¹

Koentjaraningrat menyatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terutama pada tahap penyidikan selalu menjadi perhatian bagi banyak pihak. Selama ini hanya terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK). Ketiga instansi tersebut memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi Prajurit TNI yang dididik dengan disiplin juga dapat terlibat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Seperti contoh kasus korupsi pengadaan alat utama sistem senjata (selanjutnya disebut Alutsista). perkara korupsi ranah militer yang melibatkan perwira aktif TNI yakni perkara

terpidana Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2010-2014. Teddy diganjar dengan pidana yang hampir sama dari Pengadilan Militer II Jakarta, pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yakni penjara seumur hidup.³

Kasus dugaan korupsi pengadaan satu helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) VVIP senilai Rp 738 miliar tahun anggaran 2016 di TNI AU pada 2016-2017. KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Sementara Puspom sudah menetapkan empat orang tersangka. Pertama, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy sebagai tersangka. Penetapan Fachri dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.⁴

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan aliran positivisme, hukum mengajarkan bahwa hukum timbul dari suatu kekuasaan yang berwenang. Kewenangan disini dalam arti kompetensi. Hukum secara ketat ditentukan oleh superior politik terhadap inferior politik. Dan konsep pemikiran yang demikian dipertegas oleh Notosusanto, bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan baik secara vertikal maupun secara horizontal berakibat pula

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm.67

² Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

³ <https://www.Hukum.online.com/oknum-militer.korupsi> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 10:30 WIB

⁴ Evi Hartanti, *Op.cit* ,hlm.68

terhadap jenis hukum yang dihasilkan dari wewenang tersebut.⁵Oleh karena itu kewenangan KPK yang di lahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah di landasi legitimasi hukum.⁶

Wewenang luar biasa yang di miliki lembaga KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi menuai pro kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang melibatkan oknum TNI berbenturan dengan sumpah prajurit yang harus menjaga rahasia dan patuh kepada atasan serta Undang-Undang Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi “Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit”.⁷

Tindak pidana korupsi pengadaan alutsista melibatkan Prajurit TNI Selama ini, dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berasal dari internal militer itu sendiri yaitu Polisi Militer (POM) dan/Oditur Militer atau melalui pengusutan koneksitas.⁸ Sistem ini menghendaki adanya kolaborasi antara penegak hukum sipil (KPK) dan militer. Dalam kondisi seperti demikian, KPK kerap kali inferior dibanding militer khususnya pada proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Pada sistem koneksitas ini, lembaga KPK dalam mengusut kasus korupsi di tubuh TNI seringkali memiliki peran yang minimal.⁹

Ditinjau dari kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi pengadaan alutsista di Indonesia ini, merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang dapat diselidiki dan ditangani oleh KPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa;¹⁰

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Busyro Muqoddas menambahkan bahwa kasus korupsi dalam tubuh TNI paling besar sebenarnya datang dari pengadaan alutsista. Maka dari itu, perlu transparansi dalam bidang militer. “Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elite TNI dan pemerintah.”¹¹Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat utama sistem senjata oleh oknum Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat utama sistem senjata oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia?

⁵ Faisal Santiago, *Hukum Acara Peradilan Niaga*, Cintya Press, Jakarta, 2005, hlm. 16

⁶ *Ibid*, hlm. 23

⁷ Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI, Jakarta.2006, hal.37

⁹Septian Pradipta Nugraha *Justice Collaborator Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Alutsista*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.2017, hlm.68

¹⁰ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ <http://Hukumonline.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas-yang-belum-terselesaikan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 15:45 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat utama sistem senjata khususnya yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat utama sistem senjata oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademis terutama dalam hal tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak saja terjadi pada masyarakat sipil. Tetapi, juga bisa terjadi didalam tubuh Angkatan Militer.
- c. Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah khususnya penegak hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam tubuh angkatan Militer

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan yang menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara

horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara, pada suatu negara didasarkan atas perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya, yang fungsinya menciptakan ketertiban administrasi penyelenggaraan kenegaraan. Diantara perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang secara substansional mengatur Kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Lingkup Kewenangan dan fungsi yang diembankan KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup Kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif, yang secara umum keseluruhan sumber daya penyelenggara administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketatapemerintahan tersebut lazim di sebut aparatur negara. Pelaksanaan yang dimiliki aparatur negara, harus dilakukan secara konsekuen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Mengingat begitu penting aspek kewenangan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewenangan merupakan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.

2. Teori Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan kriminal merupakan saduran dari istilah inggris “criminal policy” yang lazim juga dikenal istilah penal policy. Mengartikan kebijakan kriminal sebagai cabang dari ilmu hukum pidana yang menaruh perhatian berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (the branch of criminal science concerned with protecting against crime).¹²

Kebijakan kriminal dalam arti luas, lazim disebut dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang terkadang disebut dengan pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana. Akan tetapi istilah ini lebih luas dari istilah pertama karena mencakup juga kebijakan perundang-undangan (legislasi) maupun kebijakan penegak hukum.¹³

Menurut Soedarto, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Dalam rangka pemilihan alternatif, maka tidak ada absolutisme dalam pemilihan alternatif tersebut. Dengan kata lain, keputusan untuk menuntut atau menuntut suatu perkara merupakan problem kebijakan. Dalam pemilihan tersebut terkandung makna diskresi yang dapat digunakan untuk menentukan sarana apa yang harus dipilih untuk menanggulangi kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian

kepuustakaan. Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada penelitian asas-asas hukum, yaitu terkait asas-asas legalitas, dengan menelusuri berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan Kewenangan KPK dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan oknum Tentara Nasional Indonesia.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersiar

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepuustakaan atau studi dokumenter.

¹² Ali Zaidan, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.100

¹³ *Ibid*,

Kepustakaan atau studi dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Bahan hukum yang dikumpulkan di atas seterusnya diolah berdasarkan masalah pokok yang diteliti dengan disertai analisis, dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti untuk selanjutnya dibahas dengan berbagai teori hukum pidana. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Tindak pidana juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri tiga jenis, yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.¹⁴

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁵

- a) Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidak jujurannya atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.¹⁶

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

¹⁶ Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT Raja GrafindoPersada, Padang, 2001, hlm.3

Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.¹⁷

2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindakan pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*kekuasaan manapun*” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa Pasal seperti Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah : Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tanggung waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 139 KUHPM.

Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan negara,

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Balikpapan, 2008, hlm. 186

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas

Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Landasan koneksitas terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Akan tetapi, jauh sebelum KUHAP lahir telah diusahakan suatu bentuk “Keputusan Bersama” antara Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Jaksa Agung, Keputusan Bersama tersebut (No.B/16/XII/1971) berupa pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, mengenai kebijaksanaan perkara koneksitas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata oleh Oknum TNI

Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan

yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggaraan administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur negara.¹⁹

Kewenangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista khususnya yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI/Oknum Militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu pada perkara korupsi ranah militer yang dilakukan perwira aktif TNI yakni perkara terpidana Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada tahun 2010-2014. Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU pada tahun 2016-2017 telah melakukan kontrak langsung dengan produsen pengadaan Helikopter AW-101 senilai Rp 514 miliar. Pada bulan Februari 2016, setelah menandatangani kontrak dengan TNI AU PT. Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp. 738 miliar.²⁰

Pada umumnya Proses pemeriksaan pada perkara korupsi yang dilakukan oleh warga sipil bersama-sama dengan anggota militer (korupsi) di Indonesia. Yaitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Acara pemeriksaan Koneksitas diatur dalam Bagian Kelima mulai Pasal 198 sampai dengan Pasal 203, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Elwi Danil, *Op. cit*

²⁰ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018/kpk-mengeluh-perwira-tni-au-persulit-usut-korupsi-helikopter> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada Pukul 13:45 WIB

Dengan diberlakukannya hukum pidana militer bagi anggota militer telah memosisikan peradilan militer sebagai suatu penyelenggaraan Peradilan Negara, memeriksa dan mengadili suatu delik yang terjadi dalam kemiliteran. Peradilan Militer tidak berpuncak pada Mabes TNI atau Dephankam tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam kehidupan militer yang bersifat khusus seringkali terbentuk opini publik bahwa segala sesuatu yang ada dalam kemiliteran dipandang tertutup atau kurang transparan. Pandangan ini juga ditujukan kepada peradilan militer yang sering juga dipandang sangat tertutup apalagi kasus tindak pidana militer yang dilakukan oleh atasan-atasan yang berpangkat salah satunya yakni kasus pengadaan alutsista.

Tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang kita ketahui selama ini melibatkan Prajurit TNI hanya ditangani melalui pengusutan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer (POM) dan atau Oditur Militer atau melalui pengusutan koneksitas. Sistem koneksitas ini menghendaki adanya kolaborasi antara penegak hukum sipil (KPK) dan militer. Dalam kondisi seperti demikian, KPK kerap kali inferior dibanding militer. Pada sistem koneksitas ini, lembaga KPK dalam mengusut kasus korupsi di tubuh TNI seringkali memiliki peran yang minimal. Lembaga KPK pada umumnya hanya berperan melakukan koordinasi dan tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses investigasi yang lebih besar dan pada akhirnya Proses penegakan hukum berjaan tidak efektif.²¹

Menurut kamus Hukum yang diterbitkan oleh Reality Publisher memberikan pengertian bahwa hak eksklusif menunjuk pada pemegang hak untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri dan memberikan izin kepada yang lain. Dari batasan pengertian sebagaimana dikemukakan diatas dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditemukan adanya hak

eksklusif dalam hal kewenangan menangani kasus korupsi yang hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya yaitu:

1. KPK diperbolehkan oleh aturan Hukum untuk melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi tindak pidana korupsi.
2. KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak Hukum, penyelenggara Negara, atau orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU Tipikor.
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)Sehingga dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Hukum menempatkan KPK dalam hal menangani kasus korupsi diberi hak eksklusif.

Dari segi kewenangan KPK diatur mengenai kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 huruf c UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, dari segi kewenangan KPK memiliki hak yang diberi oleh Hukum untuk dipakai dalam pekerjaannya pada penegakan Hukum.dalam hal ini semakin memperkuat posisi dari hak Eksklusif KPK.²²

Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut - larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau, Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,

²¹ <https://www.pinterpolitik.com/jalan-terjal-mengungkap-korupsi-ditubuh-angkatan-militer> diakses pada tanggal 20 November 2019 Pukul 20 : 00 WIB

²² Aditjondro George Junus, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam MENCURI UANG RAKYAT 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku I*, Yayasan Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm 57

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori kewenangan Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Brouwer berpendapat pada kewenangan atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya dan memberikannya kepada pejabat atau badan yang berkompeten. Sama halnya seperti lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.²³

B. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum TNI

Secara hukum, proses penanganan korupsi di dalam tubuh militer memang berbeda dengan kasus korupsi yang membelit kalangan sipil. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat pengungkapan kasus korupsi militer terhambat. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Peradilan Militer. Revisi Undang-Undang ini belum juga selesai dilakukan sehingga menghambat KPK untuk menangani kasus korupsi di lingkungan angkatan Militer.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum,

merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur

²³ Nur Basuki Wiranto, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.65

dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang dilingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Kinerja peradilan militer sebagai sebuah sistem berada pada titik yang buruk. Berbagai keluhan dari masyarakat muncul berkaitan dengan tidak transparan dan akuntabelnya peradilan militer, khususnya dalam mengadili tindak pidana korupsi. Bahkan produk hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar acuan kompetensi peradilan militer sudah banyak dan sering dikritik agar dilakukan perubahan, banyak sekali tuntutan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat yang menginginkan anggota militer yang melakukan tindak pidana yang salah satunya terkait korupsi, agar dibawa ke peradilan umum dan tidak perlu lagi dibawa ke peradilan militer, hal ini sebagai bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya peradilan militer, sehingga sangat

diperlukan politik criminal yang baik kedepannya.

Sampai saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum kunjung selesai, karena terdapat tolak-tarik yang alot dalam tahap pembahasannya antara pihak legislatif dan eksekutif. Keadaan ini berimbas pada penegakan hukum dilingkungan peradilan militer, sebagai contoh terkait penegakan hukum terhadap perkara dengan Putusan Nomor 363 KMIL/2017 dengan inisial TH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saat itu terhadap kasus tersebut Inspektoral Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 12,682,487.59 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2010 dan 2015. Dan kasus korupsi lain dilakukan oleh W Putusan Nomor: 47-K/PM II-08/AD/II/2019.

Korupsi perlu segera ditanggulangi karena penanggulangan korupsi merupakan awal dari penyelesaian berbagai krisis di Indonesia. Membicarakan masalah penanggulangan kejahatan, artinya berbicara Criminal Policy, karena Criminal Policy merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.²⁴

Penanggulangan kejahatan termasuk korupsi dapat dilakukan secara penal dan nonpenal. Sarana penal biasanya disebut dengan *Penal Policy* atau Kebijakan Hukum Pidana. Meskipun sarana penal memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu efektivitasnya tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya nonpenal. Suatu

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang, 2011, hlm. 1.

²⁵ *Ibit*, hlm 3.

kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Praperadilan kasus Helikopter AW 101, selain hakim menggunakan Pasal 42 sebagai dasar ditolaknya permohonan terkait ketidakabsahan penetapan tersangka, Juliandi yang merupakan salah satu tim biro hukum KPK menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Pejabat TNI adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, KPK memberikan beberapa putusan yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah antara lain putusan dalam kasus cek pesawat dengan terdakwa/ terpidana atas nama Miranda Swaray Gultom, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Muhammad Adami Okta, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Brigjen (TNI) Teddy Hernayadi, serta putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Fahmi Darmawansyah.

Dalam hal pelaku yang ditindak oleh KPK dan militer, KPK memiliki kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga dalam hal ini boleh dibentuk tim koneksitas maupun tidak dibentuk tim koneksitas. Dalam hal dapat dilakukannya penetapan tersangka pada mekanisme koneksitas sama halnya dengan penetapan tersangka pada mekanisme peradilan yang bukan koneksitas yaitu harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bukti permulaan yang cukup tersebut merupakan wujud perlindungan dari hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Dalam hal ini guna menghindari kesewenang-wenangan dari penyidik. Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah sebagai persyaratan untuk dilakukannya penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setelah penetapan seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan upaya penangkapan dan penahanan. Dilakukannya penahanan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksitas yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeh.²⁶ Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU KPK. Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga *superbody* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas. Meskipun demikian, KPK tetap harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa dalam hal penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan telah berhasil membuat terang tindak pidana yang terjadi.²⁷

Terkait implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksitas adalah sah atau tidak batal demi hukum sebab

²⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101ditolak.html>, diakses pada tanggal 21 November 2019, Pukul 12.00 WIB

²⁷Tri Agung Kristanto, *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta. hlm. 32

perkara tindak pidana koneksitas dapat diperiksa secara terpisah (Split). Sehingga dalam hal ini boleh dilakukan pemeriksaan perkara secara terpisah maupun tidak dilakukan pemeriksaan secara terpisah dalam hal dilakukannya pemeriksaan secara koneksitas. Namun dalam hal pemeriksaan secara terpisah splitsing, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemeriksaan tidak menjadi satu rangkaian mekanisme koneksitas yang utuh sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pada prosesnya.

Maksud dan tujuan dari mekanisme koneksitas adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan bahwa proses yang ditempuh tidak semudah pada perkara pidana biasa. Alasan mengapa mekanisme koneksitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksitas harus menunggu keputusan dari Menhankam dan disetujui oleh Menkeh. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksitas ini. Dalam hal ini termasuk waktu dalam proses pengusulan hakim koneksitas.

Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sebagaimana Pasal 25 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah perekonomian dan keuangan negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan perkara tindak pidana korupsi didahulukan dibandingkan dengan penanganan perkara lainnya.

Secara khusus hukum acara dalam pengadilan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU Pengadilan Tipikor, ketentuan umum

lain yang tidak diatur dalam undang-undang khusus menggunakan KUHAP. Secara umum hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada. Sehingga dalam hal ini meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur, asas-asas hukum acara pidana khusus. Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termasuk salah satu asas hukum acara pidana umum juga berlaku pada hukum acara pidana khusus.²⁸

Apabila ditinjau menurut teori kebijakan pidana, terkait peraturan pembentukan tim tetap koneksitas dapat dirumuskan lebih baik lagi agar dapat diimplementasikan dengan mudah dalam penerapannya sehingga tercapainya keadilan. Kebijakan hukum pidana dari Marc Ancel menyebut istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” yang berasal dari bahasa Inggris sehingga istilah “Kebijakan Hukum Pidana” sama artinya dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Selanjutnya Marc Ancel mendefinisikan arti Politik Hukum Pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Definisi hukum positif (*the positive rules*) menurut Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.²⁹

Selain Marc Ancel, Soedarto juga mengemukakan bahwa dengan melaksanakan politik hukum pidana sama halnya dengan membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna di dalam masyarakat. Hal ini digunakan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.³⁰

Tindak pidana korupsi yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja namun juga dilakukan bersama-sama oleh

²⁸ Ermansyah Djaja & Tarmizi, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi: implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm. 52.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm.58

mereka yang berlainan lingkungan peradilannya sehingga diperlukan pengaturan yang mengandung adanya kepastian hukum guna terciptanya keadilan. Pernyataan Marc Ancel dan Sudarto memiliki relevansi dengan permasalahan dalam pengaturan mekanisme koneksitas yang dinilai masih memiliki beberapa masalah dalam penerapannya sehingga kedepannya diperlukan suatu peraturan terkait mekanisme koneksitas yang memiliki ketentuan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³¹

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidikan yang dimiliki KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK memiliki dasar hukum Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Kewenangan luar biasa yang dimiliki lembaga KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menuai pro kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang melibatkan oknum TNI berbenturan dengan sumpah prajurit yang

harus menjaga rahasia dan patuh kepada atasan serta Undang-Undang Peradilan.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Perajurit TNI terkait kasus korupsi pengadaan alutsista adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah (non koneksitas). Terkait implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksitas adalah sah atau tidak batal demi hukum sebab perkara tindak pidana koneksitas dapat diperiksa secara terpisah (Split). Alasan mekanisme koneksitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksitas harus menunggu keputusan dari Menhankam dan disetujui oleh Menkeh. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksitas ini.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI, penyidik KPK harus mengacu pada asas *Equality Before the Law*, karena lembaga KPK merupakan lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
2. Jadi apabila pengaturan tentang prosedur dan tata cara mengenai penyidikan atau lembaga mana yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI masih belum jelas maka, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membentuk suatu peraturan tentang tata cara dan atau prosedur mengenai penyidikan atau undang-undang yang ada harus diamandemen agar

³¹ Ermansyah Djaja & Tarmizi, *Op.cit*, 58

tidak terjadi kesalahan dalam kewenangan penyidikan oleh lembaga manapun termasuk KPK, Dan agar pelaksanaan atau implementasi dari penyidikan tersebut memiliki payung hukum yang jelas dan memiliki legalitas yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Kristanto, Tri, 2009, *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta.
- Basuki Wiranto Nur, 2008, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Danil Elwi, 2001, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT Raja GrafindoPersada, Padang.
- Djaja Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Balikpapan.
- George Junus Aditjondro, 2002, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam MENCURI UANG RAKYAT 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku I*, Yayasan Aksara, Yogyakarta.
- Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Setyawati Deni, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Santiago Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Niaga*, Cintya Press, Jakarta.
- Zaidan Ali, 2015 *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Bagir Manan, 2006, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI, Jakarta.

Septian Pradipta Nugraha, 2017, *Justice Collaborator Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Alutsista*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

C. Pengaturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

D. Website

- <https://www.Hukum.online.com/oknum-militer.korupsi> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 10:30 WIB
- <http://Hukumonline.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas-yang-belum-terselesaikan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 15:45 WIB
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018/kpk-mengeluh-perwira-tni-au-persulit-usut-korupsi-helikopter> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada Pukul 13:45 WIB
- <https://www.pinterpolitik.com/jalan-terjal-mengungkap-korupsi-ditubuh-angkatan-militer> diakses pada tanggal 20 November 2019 Pukul 20 : 00 WIB
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101ditolak.html>, diakses pada tanggal 21 November 2019, Pukul 12.00 WIB